

IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS E-GOVERNMENT DALAM MEMINIMALISASI PENYEBARAN COVID-19 DI ERA NEW NORMAL*Implementation And Effectiveness Of E-Government In Minimizing The Spread Of Covid-19 In The New Normal Era***Nur Azizah** ^{1*}**Setyo Ardy** ²

¹Nur Azizah I, Situbondo,
Jawa Timur, Indonesia

*email: nurazizah@stkipgri-situbondo.ac.id

²Setyo Ardy Nuswantoro 2,
Palangka Raya, Kalimantan
Tengah, Indonesia

*email: setioardy@gmail.com

Abstrak

Sejak kasus pertama Covid-19 di Indonesia terjadi pada 2 Maret 2020 hingga 1 Agustus 2020, telah menginfeksi 111.455 orang positif, 5.236 orang meninggal dan tingkat kesembuhan 68.975 orang. Melihat data penyebaran Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan, penting bagi masyarakat untuk menghindari pertemuan fisik dengan kontak langsung, pertemuan publik dan padatnya penggunaan transformasi umum dalam upaya mengantisipasi masyarakat yang terinfeksi virus mematikan ini. Sejak kebijakan *new normal* mulai diterapkan demi menjaga kestabilan ekonomi sembari menyelamatkan kesehatan masyarakat yang berdampak pada proses penyebaran virus corona semakin tidak bisa diprediksi. Masyarakat menerapkan akselerasi kebijakan pelayanan berbasis teknologi berbasis e-government. Tujuan dari penelitian ini adalah dengan penerapan e-government di era *new normal* seperti saat ini menjadi pilar penting dalam mengurangi atau meminimalisasi penyebaran covid-19, dengan melembagakan hak-hak publik dalam mengetahui kinerja dan akuntabilitas badan-badan publik, sehingga dapat berimbas kepada terwujudnya *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik di setiap daerah, dimana konsep ini terdiri dari adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektif dan efisien, responsif, dan kepastian hukum.

Kata Kunci:

E-Government
Covid-19
New Normal

Keywords:

E-Government
Covid-19
New Normal

Abstract

Since the first case of Covid-19 in Indonesia occurred on March 2, 2020 to August 1, 2020, it has infected 111,455 positive people, 5,236 people died and a cure rate of 68,975 people. Seeing the increasingly worrying data on the spread of Covid-19, it is important for the public to avoid physical encounters with direct contact, public gatherings and the heavy use of public transformation in an effort to anticipate people infected with this deadly virus. Since the *new normal* policy began to be implemented in order to maintain economic stability while saving public health, which has an impact on the process of spreading the corona virus, it is increasingly unpredictable. The community implements policy acceleration based on technology-based e-government services. The purpose of this research is to implement e-government in the *new normal* era as it is currently an important pillar in reducing or minimizing the spread of covid-19, by institutionalizing the rights of the public in knowing the performance and accountability of public bodies, so that it can have an impact on the realization of *good governance* or *good governance* in each region, where this concept consists of transparency, accountability, participation, effectiveness and efficiency, responsiveness, and legal certainty.



© 2021 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Sejak kasus pertama Covid-19 di Indonesia terjadi pada 2 Maret 2020 hingga 1 Agustus 2020, telah menginfeksi 111.455 orang positif, 5.236 orang meninggal dan tingkat kesembuhan 68.975 orang. Melihat data penyebaran Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan, penting bagi masyarakat untuk menghindari pertemuan fisik dengan kontak langsung, pertemuan publik dan padatnya penggunaan transformasi umum dalam upaya mengantisipasi masyarakat yang terinfeksi virus mematikan ini (Buckee, 2020). Jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa dan kasus Covid-19 yang tercatat mencapai 2,1 juta. Berkaitan dengan data tersebut dapat kita amati tentang percepatan Covid-19 dalam menjangkiti manusia. Hal ini kemudian menjadi perhatian pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan bagi kehidupan manusia. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah, seperti *physical distancing*, WFH (*work from home*), hingga PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Pemberlakuan kebijakan ini membuat ruang gerak masyarakat menjadi terbatas. Tidak hanya itu, pembatasan interaksi mau tidak mau membuat masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya harus beralih menggunakan media *online*. Berkenaan dengan menekan penularan Covid-19, Kemenpan-RB mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah (Putri., 2018). Regulasi ini memberlakukan *work from home* secara bergantian bagi pegawai di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kebijakan ini mempengaruhi aksesibilitas pelayanan publik. Pelayanan secara tatap muka (konvensional) mulai dibatasi penggunaannya. Selebihnya, pelayanan mulai dialihkan melalui virtual (*online*). Pelayanan secara *online* ini merupakan penerapan dari *e-Government*.

Apalagi sejak kebijakan *new normal* mulai diterapkan demi menjaga kestabilan ekonomi sembari menyelamatkan kesehatan masyarakat yang berdampak pada proses penyebaran virus corona semakin tidak bisa diprediksi. Alasannya penyebaran virus ini tidak konstan namun bersifat eksponensial dengan asumsi jumlah korban terinfeksi dihitung dari peluang pertemuan fisiknya. Penyebaran yang sifatnya eksponensial di masa *new normal* (adaptasi kebiasaan baru) ini pula sewaktu-waktu menyebabkan jumlah korban terinfeksi melonjak menjadi tidak terkendalikan. Mengakibatkan lingkungan birokrasi melakukan akselerasi kebijakan demi menjaga kualitas dan memastikan kualitas pelayanan birokrasi tetap terjaga (Amryudin, 2020).

Menghadapi era kenormalan baru (*new normal*), masyarakat kini diperbolehkan beraktivitas kembali. Hanya saja segala resiko penularan Covid-19 pasti akan terjadi. Oleh karena itu, agar dapat meminimalisir resiko, diberlakukan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Penerapan prosedur dan regulasi diberlakukan secara ketat dalam menghadapi situasi *new normal*. Berbagai aktivitas di era *new normal* juga mengalami perubahan. Bidang pelayanan publik sebelum pandemi Covid-19 dilakukan secara konvensional, saat ini mulai diutamakan melalui *online*. Transformasi semacam ini menimbulkan akselerasi pengembangan *e-Government* di instansi pemerintah.

Masyarakat juga menerapkan akselerasi kebijakan pelayanan berbasis teknologi berbasis *e-government*. Secara sederhana *e-government* bisa dipahami sebagai penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan pelayanan publik (Forman, 2005). (Kurniawan, 2020) Menjelaskan *e-Government* adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan pengiriman layanan pemerintah. Layanan ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi warga negara, mitra bisnis, maupun

karyawan. Seiring dengan adanya wabah Covid-19, (L. Glyptis, 2020) mengatakan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak bagi perkembangan transformasi digital dalam pemberian pelayanan publik. Menghadapi Pandemi Covid-19, kini telah mendorong setiap lembaga publik atau institusi pemerintah agar mau mengakselerasi digital untuk mengoptimalkan pelayanan publik.

Salah satu bentuk teknologi komunikasi yang mendukung penerapan UU KIP tahun 2008 ini adalah penggunaan aplikasi electronic government (e-government) yang bertujuan untuk membentuk sistem pelayanan pemerintahan yang lebih mudah dan cepat dengan menggunakan situs internet, sehingga memudahkan penyebaran informasi kepada masyarakat dan mengurangi penyebaran covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah dengan penerapan e-government di era new normal seperti saat ini menjadi pilar penting dalam mengurangi atau meminimalisasi penyebaran covid-19, dengan melembagakan hak-hak publik dalam mengetahui kinerja dan akuntabilitas badan-badan publik, sehingga dapat berimbas kepada terwujudnya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik di setiap daerah, dimana konsep ini terdiri dari adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektif dan efisien, responsif, dan kepastian hukum.

Penggunaan e-Government sejatinya mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal ini berhubungan dengan penerapan e-Government, terlebih dalam perwujudan asas huruf (f) partisipatif, huruf (h) keterbukaan, huruf (i) akuntabilitas, huruf (k) ketepatan waktu, serta huruf (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah *systematic literature review* dengan menggunakan rujukan (Kitchenham., 2004). Systematic literature review merupakan proses identifikasi, evaluasi, dan

penafsiran dari penelitian-penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian, atau topik, atau fenomena tertentu. Adapun langkah dan tahapan penelitian adalah sebagai berikut : 1) Proses pencarian literatur yang relevan dengan tujuan dan pertanyaan penelitian dilakukan pada 3 database jurnal dan artikel penelitian yaitu Scopus, Scimedirect dan Researchgate. 2) Setelah dilakukan proses pencarian dan pengumpulan (unduh) jurnal dan artikel, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemilihan literatur yang sesuai dengan kriteria. Kriteria tersebut adalah : a) Objek penelitian merupakan negara, pemerintah (pusat maupun daerah), serta organisasi, institusi dan lembaga dibawah pemerintah. b) Penelitian menjabarkan penggunaan e-governmet dalam pengimplementasian dan efektivitasnya. c) Penelitian menggunakan bahasa internasional dan bersifat peer-review. Setelah dilakukan pemilihan berdasarkan kriteria diatas, maka didapatkan literatur sebanyak yang telah digunakan sekarang (R. Meiyanti, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Kajian Pustaka

Menurut (H. Choi, 2016.) E-Government adalah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Menurut (D. Napitupulu, 2017) E-Government merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintah menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan (Elkadi., 2013.) menguraikan E-Government adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (Shared goals) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi

bersama dari pada stakholder yang ada misalnya: a) Meminimalisir tersebarnya penyakit covid-19 yang sekarang mulai merajalela di masyarakat. b) Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya; c) Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparans; d) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat meluli kinerja pelayanan publik; e) Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis;

2. Implementasi

Karena masyarakat atau komunitas dimana E-Government tersebut diimplementasikan, maka masanya akan sangat bergantung pada stuasi dan kondisi masyarakat setempat. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa E-Government adalah upaya untuk penyelenggaraan pamerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meminimalisasi penyebaran covid-19 dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efesien. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa E-Government merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu manjalankan sistem pemerintah secara efesien.

Ada hal utama yang dapat kita tarik dari pengertian E-Government diatas, yaitu: a. Penggunaan teknologi informasi (internet) sebagai alat baru; b. Tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan secara efektif, efesien dan produktif dalam penggunaan teknologi internet, seluruh proses atau prosedur yang berbelit-belit dapat dipangkas. Ada banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh pemerintah yang melaksanakan proses transformasi menuju E-Government, diantaranya adalah sebagai berikut: a. Mengurangi biaya administrasi relasi dan interaksi; b. Meningkatkan transfaransi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah; c. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stake holder nya baik masyarakat maupun kalangan bisnis dan industri;

d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan baru; e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat informasi yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi; f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai metra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara demokrasi. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono., 2012.). Dari pengertian diatas, maka dalam penelitian ini penulis menetapkan variabel penelitian E- Government pada tabel di bawah ini.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Penerapan E-Government Menurut Inpres No 3 Tahun 2003	Persiapan	1. Pembuatan situs Informasi disetiap lembaga 2. Penyiapan SDM 3. Penyiapan sarana akses 4. Sosialisasi Situs Informasi
	Pematangan	Pembuatan Situs Informasi publik interaktif
	Pemantapan	1. Pembuatan Situs Transaksi pelayanan publik 2. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain
	Pemanfaatan	Government to Citizen

Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah

melalui jaringan informasi, pengembangan E-Government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkat (Saleeb., 2020) yaitu: a. Tingkat Pertama (Persiapan) 1. Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi setiap lembaga; 2. Sosialisasi situs web untuk internal dan publik. b. Tingkat Kedua (Pematangan) 1. Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif; 2. Pembuatan antar keterhubungan dengan lembaga lain. c. Tingkat Ketiga (Pemantapan) 1. Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik; 2. Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. 21 d. Tingkat Keempat (Pemanfaatan) Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Citizens/consumers (G2C).

Konsep E-Government dikenal pula empat jenis klasifikasi, yaitu: a. Government to Citizens/consumers Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi E-Government yang paling umum yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain tujuan utama dari dibangunnya aplikasi E-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari (J. Rajapakse, 2012.). Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut : Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang ke komdag dan antri untuk memperoleh pelayanan. b. Government to Business Salah satu tugas utama dari

sebuah pemerintahan adalah pembentukan sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dan menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Contoh dari aplikasi E-Government berjenis G-to-B ini adalah : Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet. c. Government to Governments Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari kehari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya dan lain sebagainya. Contoh peranan E-Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain : Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan jumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jendral untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang

sedang di berada di tanah air.(Richardus Eko Indrajit 2006:52).

3. Efektivitas

Pada masa Covid-19, birokrasi dituntut untuk mengubah strategi pelayanan agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Strategi ini diharapkan mampu diimplementasikan secara cepat agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat bisa saling menyesuaikan diri dengan perubahan substansi dalam proses pelayanan. Masyarakat yang notabene objek dari pelayanan dari tugas-tugas pemerintah mengharapkan efektifitas dan efisiensi ASN melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah dengan maksimal. Bentuk tanggung jawab ASN tersebut diwujudkan dengan transparansi data, pelayanan dan kecepatan proses kepengurusan administrasi masyarakat.

Apalagi sejak kebijakan *new normal* mulai diterapkan demi menjaga kestabilan ekonomi sembari menyelamatkan kesehatan masyarakat yang berdampak pada proses penyebaran virus corona semakin tidak bias diprediksi. Alasannya penyebaran virus ini tidak konstan namun bersifat eksponensial dengan asumsi jumlah korban terinfeksi dihitung dari peluang pertemuan fisiknya. Penyebaran yang sifatnya eksponensial di masa *new normal* (adaptasi kebiasaan baru) ini pula sewaktu-waktu menyebabkan jumlah korban terinfeksi melonjak menjadi tidak terkendalikan. Mengakibatkan lingkungan birokrasi melakukan akselerasi kebijakan demi menjaga kualitas dan memastikan kualitas pelayanan birokrasi tetap terjaga (Amrynudin, 2020).

KESIMPULAN

Sejak kebijakan *new normal* mulai diterapkan demi menjaga kestabilan ekonomi sembari menyelamatkan kesehatan masyarakat yang berdampak pada proses penyebaran virus corona semakin tidak bisa diprediksi. Alasannya penyebaran virus ini tidak konstan namun bersifat eksponensial dengan asumsi jumlah korban terinfeksi dihitung dari peluang pertemuan fisiknya. Penyebaran yang sifatnya eksponensial di masa *new normal* (adaptasi kebiasaan baru) ini pula sewaktu-waktu menyebabkan jumlah korban terinfeksi melonjak menjadi tidak terkendalikan.

Masyarakat menerapkan akselerasi kebijakan pelayanan berbasis teknologi berbasis e-government. Penggunaan aplikasi electronic government (*e-government*) yang bertujuan untuk membentuk sistem pelayanan pemerintahan yang lebih mudah dan cepat dengan menggunakan situs internet, sehingga memudahkan penyebaran informasi kepada masyarakat dan mengurangi penyebaran covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah dengan penerapan e-government di era *new normal* seperti saat ini menjadi pilar penting dalam mengurangi atau meminimalisasi penyebaran covid-19, dengan melembagakan hak-hak publik dalam mengetahui kinerja dan akuntabilitas badan-badan publik, sehingga dapat berimbas kepada terwujudnya *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik di setiap daerah, dimana konsep ini terdiri dari adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektif dan efisien, responsif, dan kepastian hukum.

REFERENSI

- Amrynudin, A. D. (2020). Birokrasi Dan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19. . *Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. XII, No.9//Puslit/Mei/2020*.
- Buckee, C. O. (2020). Aggregated mobility data could help fight COVID-19. . *Science, eabb8021. doi:10.1126/science.abb8021* .
- D. Napitupulu, D. I. (2017). “Socio-technical factors of e-government implementation”.,. *Int. Conf. Electr. Eng. Comput. Sci. Informatics, , vol. 4, no. September, pp. 690–695. .*
- Elkadi., H. (2013.). “Success and failure factors for e-government projects : A case from Egypt”., *Egypt. . Informatics J., , vol. 14, no. 2, pp. 165–173. .*
- Forman, M. (2005). Using IT to Transform the Effectiveness and Efficiency of Government. . *Journal E-Government and Information Technology., Hal.27*.
- H. Choi, M. J. (2016.). “Rethinking the assessment of e-government implementation in developing countries from the perspective of the design–reality gap: Applications in the Indonesian e-procurement system”., . *Telecomm. Policy, , vol. 40, no. 7, pp. 644–660. .*
- J. Rajapakse, A. V. (2012.). “E-Government implementations in developing countries: Success and failure, two case studies”., . *ICIAFS 2012 - Proc. 2012 IEEE 6th Int. Conf. Inf. Autom. Sustain., , pp. 95–100. .*
- Kitchenham., B. (2004). “Procedures for Performing Systematic Literature Reviews”. *Jt. Tech. Report, Keele Univ. TR/SE-0401 NICTA TR-040001IT.1, , p. 33. .*
- Kurniawan, R. &. (2020). Implementasi E-Government Kulon Progo: Inovasi Dinas Kesehatan Melalui Aplikasi BumilKU 2019. . *Jurnal Sosial Politik, 6(2), , 142–156. https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.11077* .
- L. Glyptis, M. C. (2020). “E-Government implementation challenges in small countries: The project manager’s perspective”.,. *Technol. Forecast. Soc. Change, , vol. 152. .*
- Putri., J. K. (2018). “Obstacle Factor Analysis of E-Government”. *Int. Conf. Adv. Comput. , Sci. Inf. Syst., pp. 57–62. .*
- R. Meiyanti, B. U. (2019). “E-Government Challenges in Developing Countries: A Literature Review,”. *2018 6th Int. Conf. Cyber IT Serv. , Manag. CITSM 2018, no. Citsm, pp. 1–6, 2019* .
- Saleeb., S. E. (2020). “ASSESSING THE ADOPTION OF EGOVERNMENT USING TAM MODEL: CASE OF EGYPT Sara,” . *Int. J. Manag. Inf. Technol. , Vol.12, vol. 12, no. 1, pp. 1–14. .*
- Sugiyono. (2012.). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.